

ALTERNATIF STRATEGI PENGEMBANGAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG LAMONGAN JAWA TIMUR

*Alternative Development Strategy of
Brondong Nusantara Fishing Port (NFP) Lamongan East Java*

Agus Suherman¹

¹ Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jurusan Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Diponegoro Semarang
Jl. Hayam wuruk 4A Semarang

Diserahkan : 30 Nopember 2009; Diterima : 28 Januari 2010

ABSTRAK

Strategi semakin diperlukan PPN Brondong akibat adanya kecenderungan semakin meningkatnya intensitas persaingan dalam di Pelabuhan Perikanan (PP) nasional. Strategi tersebut merupakan turunan dari strategi usaha PP agar antar bidang di PPN Brondong memiliki kesamaan arah gerak untuk pencapaian sasaran PPN Brondong. Tujuan penelitian adalah untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Brondong. Metode penelitian adalah metode survey deskriptif yang bersifat studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi pengembangan PPN Brondong meliputi 1) optimalisasi pemanfaatan potensi SDI; (2) menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional; (3) pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional PP; (4) peningkatan kapasitas kelembagaan; dan (5) pengawasan dan penegakan hukum

Kata Kunci : PPN Brondong, Strategi Pengembangan, Lamongan Jawa Timur

ABSTRAK

A strategy is increasingly needed by Nusantara Fishing Port (NFP) Brondong due to the tendency of the increasing intensity of competition in the national Fishing Port (FP). This strategy is derived from business strategy for inter-sector regulation on NFP Brondong have the same direction of motion for the achievement of targets NFP Brondong. The purpose of this study is to formulate development strategies NFP Brondong. The method used a case study descriptive survey. The results of this study show that NFP Brondong development strategy include 1) optimizing the utilization of the potential of SDI, (2) to provide facilities that meet international standards, (3) maintenance and improvement of operational facilities of FP, (4) institutional capacity building, and (5) supervision and law enforcement.

Key Words: NFP Brondong, Development Strategy, Lamongan East Java

PENDAHULUAN

Pelabuhan Perikanan (PP) adalah pusat aktivitas nelayan, sehingga keberadaannya sangat diperlukan. Sebagaimana disebutkan oleh Kamaluddin (2002) dan Fauzi (2005) bahwa sebagai sebuah infrastruktur pembangunan ekonomi, pelabuhan memiliki peranan sangat penting sebagai penggerak roda ekonomi suatu kawasan. Sejarah juga mencatat bahwa sebelum era dirgantara berkembang pesat, pelabuhan merupakan titik awal tumbuhnya suatu wilayah karena pelabuhan menjadi basis pusat ekonomi

melalui perdagangan baik melalui intrawilayah maupun antar negara. Pelabuhan dan jalur perdagangan laut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses panjang peradaban kuno menjadi peradaban modern.

Fauzi (2005) menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dengan demikian, dalam konteks pembangunan kelautan, pelabuhan yang digolongkan baik harus memenuhi syarat 3C yakni comprehensive, coordinated dan continuing. Fungsi pelabuhan laut yang

komprehensif akan menunjang aktivitas ekonomi kelautan lainnya, yang pada gilirannya akan mengurangi biaya transaksi sehingga menyebabkan pelabuhan lebih efisien dan memberikan manfaat ekonomi yang tinggi. Pelabuhan laut yang terkoordinasi dengan baik juga akan memberikan fungsi pelayanan yang optimal sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap jasa pelabuhan itu sendiri di masa mendatang.

Keberhasilan dalam pengembangan, pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan serta optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari pembangunan perikanan tangkap. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa pembangunan pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan telah dapat menimbulkan dampak pengganda “*multiplier effects*” bagi pertumbuhan sektor ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan Pendapatan Asli Daerah (Direktur Prasarana Perikanan Tangkap, 2004).

PPN Brondong memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut. PPN Brondong selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan lain-lain, juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar PPN Brondong. PPN Brondong yang berfungsi dengan baik akan merupakan titik temu (*terminal point*) yang menguntungkan antara kegiatan ekonomi di laut dengan kegiatan ekonomi di darat.

Strategi diperlukan oleh setiap Pelabuhan Perikanan (PP) agar memiliki arah yang jelas dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Strategi semakin dirasakan penting bagi berbagai PP untuk mengembangkan *competitive advantage* sehingga PP tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga dapat memenangkan persaingan. Pihak manajemen PPN Brondong juga menganggap perlu memformulasikan strategi meskipun pada saat ini masih menjadi *PPN terbaik* dalam industri perikanan tangkap.

Strategi semakin diperlukan PPN Brondong akibat adanya kecenderungan semakin meningkatnya intensitas persaingan dalam di PP

nasional. Uraian di atas membuktikan bahwa suatu strategi semakin dibutuhkan oleh PPN Brondong.

Berkaitan dengan hal itu, PPN Brondong perlu merumuskan rencana strategi yang tepat sesuai dengan tiga pilar strategi pembangunan nasional yakni propoor, pro-job dan pro-growth. Strategi tersebut harus berbasiskan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Penelitian ini bertujuan untuk Merumuskan Strategi pengembangan PPN Brondong

METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan langsung di PPN Brondong. Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang berkompeten. Data sekunder berupa kondisi geografis, demografis, keadaan sosial ekonomi masyarakat di lokasi dikumpulkan dari instansi terkait yaitu Dinas Perikanan dan Kelautan, PPN Brondong, Perum PPS serta instansi lain yang terkait dalam penelitian ini.

Analisis SWOT

Analisis yang digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Brondong menggunakan pendekatan SWOT Analisis (Rangkuti 2004 Marimin 2004). Dimana analisis SWOT akan menganalisis berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan PPN Brondong. Menurut Rangkuti (2004), analisis SWOT membandingkan antara keadaan internal dan eksternal organisasi dan didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan keuntungan dan peluang dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Analisis ini menggunakan matriks SWOT untuk mendapatkan strategi yang diurutkan berdasarkan nilai skornya. Nilai skor didapat dari hasil pengumpulan pendapat responden ahli yang diminta mengisi kuisioner berdasarkan faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor yang terdapat dalam kuisioner tersebut didapat dari wawancara. Dari hasil wawancara dan studi pustaka serta laporan-laporan akhir tahun lembaga-lembaga yang terkait diketahui beberapa faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan pengembangan PPN Brondong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPN Brondong terletak di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Brondong, Desa Brondong, Posisi Geografis 06°-52'-20" LS dan 112°-17'-45" BT dengan jarak terhadap Ibukota Propinsi 78 km, Ibukota Kabupaten 50 km, dan Kecamatan 2 km.

PPN Brondong sebagai PP dengan tipe "Nusantara", sampai saat sudah mampu menunjukkan kinerjanya sebagai PP "Nusantara" sebagaimana dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan (DKP 2006). Dengan operasional yang telah dicapai sebagaimana tabel 17 maka apabila dibandingkan dengan standart operasional untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (Type B) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa operasional PPN Brondong dari beberapa fasilitas sudah diatas standart walaupun masih ada yang perlu ditingkatkan. Berikut lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2

Berdasarkan hasil analisis kondisi dan tingkat pemanfaatan fasilitas di PPN Brondong, menunjukkan tingkat pemanfaatan yang masih belum optimal. Belum Optimalnya tingkat pemanfaatan fasilitas di PPN Brondong oleh kekurangan fasilitas yang dimiliki merupakan salah satu permasalahan yang ada di PPN Brondong disamping permasalahan lainnya, permasalahan tersebut antara lain:

- Terbatasnya fasilitas yang tersedia seperti sempitnya lahan pelabuhan, dangkalnya kolam pelabuhan, dermaga masih terbatas, gedung sortir belum tersedia, air untuk mencuci ikan dan lantai masih belum ditreatment.
- Kurangnya kesadaran pengguna jasa (nelayan, pedagang ikan) dan orang-orang yang berusaha di PPN Brondong akan budaya bersih.

Selain dari analisis comparative terhadap standard PPN dan kondisi eksisting juga dilakukan analisis tingkat pemanfaatan fasilitas PPN Brondong. Dari tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada di PPN Brondong, maka dapat diketahui seberapa besar fasilitas yang telah dimanfaatkan.

Tabel 1. Fasilitas di PPN Brondong

| No | Fasilitas | Volume |
|----------|------------------------------|----------|
| 1 | Fasilitas Pokok | |
| | 1. Areal Pelabuhan | 6,9 (Ha) |
| | 2. Dermaga | 160 |
| | 3. Kolam Pelabuhan | 3 |
| | 4. Turap | 386 |
| | 5. Jalan Kompleks | 2.000 |
| 2 | Fasilitas Fungsional | |
| | 1. TPI | 1.480 |
| | 2. Gudang Keranjang | 100 |
| | 3. Selter Nelayan | 100 |
| | 4. Pabrik ES | 115 |
| | 5. Tangki Air dan Instalasi | 170 |
| | 6. Tangki BBM dan Instalasi | 175 |
| | 7. Listrik dan Instalasi | 345 |
| | 8. Genset dan Instalasi | 170 |
| | 9. Tempat Penjualan BBM | 36 |
| | 10. Bengkel | 120 |
| | 11. Gedung Pertemuan Nelayan | 125 |
| | 12. Kantor Perum | 200 |
| | 13. Kantor Administrasi | 348 |
| | 14. MCK | 60 |
| | 15. Areal Parkir | 800 |
| | 16. Ruang Sortir Ikan | 120 |
| | 17. Rambu Navigasi | 1 |
| | 18. Rumah Genset | 60 |
| | 19. Pos Satpam | 18 |
| | 20. Tower | 1 |
| | 21. SSB | 1 |
| | 22. Ruang Pengepakan Ikan | 240 |
| 3 | Fasilitas Penunjang | |
| | 1. Mess Operator | 120 |
| | 2. Rumah Dinas | 390 |
| | 3. Kios/ Warung | 250 |

Tabel 2. Tingkat Pencapaian Operasional PPN Brondong

| No | Kegiatan | Unit Satuan | Standar Indikator | Realisasi | Tingkat Pencapaian |
|----|-------------------------|-------------|-------------------|-----------|--------------------|
| 1. | Produksi Ikan | Ton/hari | 30 | 127 | 423 |
| 2. | Kunjungan Kapal | Kapal/hari | 75 | 58 | 77 |
| 3. | Jumlah Nelayan | Orang | 1000 | 15.537 | 1.554 |
| 4. | Penyaluran air Bersih | Ton/hari | 250 | 55 | 22 |
| 5. | Penyaluran Es | Ton/hari | 50 | 95 | 191 |
| 6. | Penyaluran BBM | Ton/hari | 50 | 13 | 26 |
| 7. | Nilai Uang Yang Beredar | Rp. Milyar | - | 330,27 | - |

Tabel 3. Penyediaan Fasilitas PPN Brondong bila dibandingkan dengan standard fasilitas minimal Pelabuhan Perikanan Nusantara

| No | Fasilitas | Volume | Standart | Tersedia | Kelayakan |
|----|----------------------|--------|------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1. | Tambat Labuh | GT | Untuk Kapal Perikanan >30 GT | <30 GT | Belum Memenuhi |
| 2. | Dermaga | M | Panjang Dermaga >150 m | 160 m | Memenuhi |
| 3. | Luas Kolom Pelabuhan | M | Mampu Menampung 75 Kapal | Mampu menampung >75 Kapal | Memenuhi |
| 4. | Kedalaman | LWS | Kedalaman >(-3) LWS | <(-3)m LWS | Belum Memenuhi |
| 5. | Luas Lahan | Ha | 15 Ha | 6,9 Ha | Belum Memenuhi |

Analisis Strategi Pengembangan PPN Brondong

Hasil perhitungan perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 4 yang digunakan untuk menentukan titik x (faktor internal) dan y (faktor eksternal).

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 4 maka posisi kebijakan berada pada Kuadran II pada titik (2,131 ; -0.404). Posisi strategi kebijakan pengembangan PPN Brondong dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan dan sasaran pembangunan PPN Brondong yang telah ditetapkan dengan strategi, kebijakan dan program pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan strategis yang senantiasa berkembang dinamis. Analisis dimaksud mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, di mana masing-masing analisis ditinjau dari tiga aspek utama, yakni sosial, ekonomi dan ekologi.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal, terdapat kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Keempat unsur tersebut harus dapat “dinilai” sehingga

dapat menentukan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Formulasi Strategi Pengembangan PPN Brondong

PPN Brondong dalam statusnya sebagai UPT Pusat yang operasionalnya berada di daerah, maka sudah selayaknya arah dan aktifitas organisasi diupayakan untuk senantiasa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan riil yang ada di masyarakat, serta berupaya untuk menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah sehingga terjadi sinergi program dan kegiatan yang bermuara pada kemandirian dan kesejahteraan masyarakat nelayan dan pengusaha perikanan.

Strategi pengembangan PPN Brondong meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan potensi SDI; (2) menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional; (3) pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional PP; (4) peningkatan kapasitas kelembagaan; dan (5) pengawasan dan penegakan hukum. Adapun penjelasannya masing-masing strategi tersebut adalah sebagai berikut :

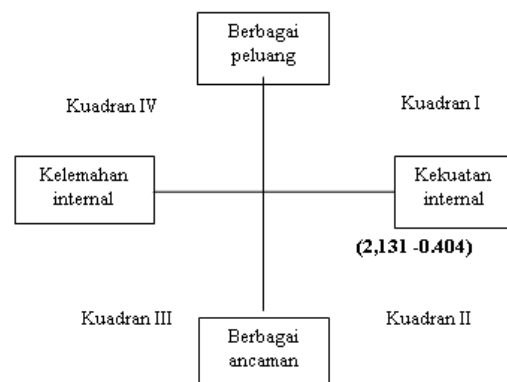
(1) Optimalisasi pemanfaatan potensi SDI

Pengembangan PPN Brondong antara lain untuk rasionalisasi pemanfaatan potensi SDI yang lebih merata sesuai daya dukung SDI-nya. Peningkatan fasilitas dan peningkatan manajemen operasional PPN Brondong, berpotensi untuk merangsang pertumbuhan yang lebih besar dengan memanfaatkan peluang mengeksplorasi SDI. Pengembangan PPN Brondong akan membuka lapangan kerja baru disegala sektor.

- (2) Menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional
Tuntutan pasar global akan mengharuskan kita untuk menciptakan penyediaan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan daya saing sehingga menarik para investor asing untuk masuk melakukan kegiatan di Indonesia. Kualitas produk yang dihasilkan dituntut memenuhi standar internasional, oleh karenanya bahan baku dituntut untuk lebih berkualitas.
- (3) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional PPN Brondong
Untuk memperlancar aktivitas perikanan tangkap, khususnya usaha penangkapan ikan di laut, perlu pemeliharaan fasilitas operasional PP. Dalam upaya mengembangkan PPN Brondong sebagai kawasan pengembangan ekonomi berbasis perikanan tangkap, diperlukan pemeliharaan fasilitas operasional. Diharapkan pengelola PPN Brondong dapat melakukan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional, sehingga kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di PPN Brondong akan mendapatkan pelayanan prima. Murdiyanto (2004) menyebutkan bahwa instansi PP merupakan instansi pemerintah yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur bagi basis kegiatan perikanan tangkap. Dalam kegiatannya PP bukan saja hanya terbatas pada masalah investasi pembangunan perangkat kerasnya saja melainkan harus memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat nelayan sebagai masyarakat pengguna dengan melaksanakan operasionalisasi fasilitas yang dibangun sesuai dengan fungsinya. Investasi pembangunan prasarana harus dapat mendukung pengembangan kegiatan

perikanan tangkap dan produksinya dalam arti luas meliputi peningkatan mutu produksi dengan penanganan dan pengolahan yang baik, memenuhi kebutuhan pasar dengan pemasaran yang kompetitif serta mengembangkan kehidupan masyarakat nelayan itu sendiri.

- (4) Peningkatan kapasitas kelembagaan
Kelembagaan pada PPN Brondong yang masih menjadi UPT Pusat sudah mengalami penataan dan secara umum sudah dapat berperan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun demikian, kelembagaan PPN Brondong masih perlu penataan lebih lanjut untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Peningkatan kapasitas kelembagaan PPN Brondong tersebut antara lain meliputi: status hukum, kewenangan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi serta pemberdayaan lebih lanjut dari lembaga dimaksud. Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dimulai dengan melakukan inventarisasi keragaan, evaluasi, formulasi, penetapan dan sosialisasi untuk implementasinya.
- (5) Pengawasan dan penegakan hukum
Keberadaan PPN Brondong sebagai suatu lingkungan kerja diharapkan akan mampu menjadi pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi perikanan berbasis perikanan tangkap yang pada gilirannya diharapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan ekonomi secara keseluruhan. Di samping itu, PPN Brondong juga mengemban tugas sebagai pusat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kelestarian SDI



Gambar 1. Diagram Penentuan Matriks *Grand Strategy*.

Tabel 4. Hasil Analisis Strategi Pengembangan PPN Brondong Terhadap Penilaian Internal Faktor Evaluasi (IFE) dan Eksternal Faktor Evaluasi (EFE)

| Uraian Faktor-faktor Internal dan Eksternal | Bobot | Rating | Skor |
|---|-------|--------|--------|
| Kekuatan | | | |
| (1) Potensi sumber daya perikanan di Laut Jawa dan sekitarnya. | 0,465 | 4 | 1,860 |
| (2) Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi di bidang pengembangan perikanan dan kelautan. | 0,260 | 5 | 1,300 |
| (3) Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai dan dapat didayagunakan serta didukung dengan biaya operasional | 0,123 | 5 | 0,615 |
| (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan <i>master plan</i> . | 0,091 | 4 | 0,364 |
| (5) Tersedia dan telah operasionalnya prasarana pengawasan terpadu di kawasan PPN Brondong. | 0,620 | 3 | 1,860 |
| Kelemahan | | | |
| (1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai. | 0,484 | 4 | 1,936 |
| (2) Fasilitas yang belum layak mendukung kualitas produksi perikanan yang didaratkan. | 0,289 | 3 | 0,867 |
| (3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan. | 0,161 | 5 | 0,805 |
| (4) Sarana dan prasarana pengawasan perikanan belum memadai. | 0,065 | 4 | 0,260 |
| Total skor kekuatan-kelemahan | | | 2.131 |
| Peluang | | | |
| (1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Lamongan. | 0,800 | 4 | 3,200 |
| (2) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional. | 0,200 | 4 | 0,800 |
| Ancaman | | | |
| (1) Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM yang belum berpihak pada nelayan dan industri perikanan. | 0,364 | 5 | 1,820 |
| (2) Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang membingungkan dan menghambat pengembangan usaha perikanan. | 0,266 | 4 | 1,064 |
| (3) Maraknya IUU fishing di perairan teritorial dan ZEEI | 0,167 | 4 | 0,668 |
| (4) Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai | 0,097 | 4 | 0,388 |
| (5) Rendahnya kualitas SDM perikanan khususnya nelayan dilihat dari rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan harapan. | 0,061 | 4 | 0,244 |
| (6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah. | 0,044 | 5 | 0,220 |
| Total skor peluang-ancaman | | | -0.404 |

Tabel 5. Matrik SWOT Strategi Pengembangan PPN Brondong

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">Internal</p> <p style="text-align: center; font-size: 4em; font-weight: bold;">External</p> | <p>KEKUATAN (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Potensi sumber daya perikanan di Laut Jawa dan sekitarnya. (2) Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi dibidang pengembangan perikanan dan kelautan. (3) Tersedianya SDM dalam jumlah yang memadai dan dapat didayagunakan serta didukung dengan biaya operasional (4) Tersedianya sarana dan prasarana yang terus dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan <i>master plan</i>. (5) Tersedia dan telah beroperasinya prasarana pengawasan terpadu di kawasan PPN Brondong. | <p>KELEMAHAN (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kemampuan manajemen maupun teknis SDM yang kurang memadai. (2) Fasilitas yang belum layak mendukung kualitas produksi perikanan yang didaratkan. (3) Terbatasnya biaya operasional dan pemeliharaan fasilitas prasarana pelabuhan. (4) Sarana dan prasarana pengawasan perikanan belum memadai. |
| | <p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Tumbuh dan berkembangnya iklim usaha sejalan dengan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong peningkatan investasi di wilayah Kabupaten Lamongan. (3) Semakin meningkatnya pangsa pasar produk perikanan baik lokal maupun nasional. | <p>SO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. • Peningkatan kualitas pelayanan PP. |

Lanjutan Tabel 5

| | | |
|---|---|---|
| <p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kebijakan pemerintah dalam penentuan harga BBM yang belum berpihak pada nelayan dan industri perikanan. (2) Adanya duplikasi peraturan dan beragamnya jenis pungutan perikanan yang membingungkan dan menghambat pengembangan usaha perikanan. (3) Maraknya IUU fishing di perairan teritorial dan ZEEI. (4) Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai. (5) Rendahnya kualitas SDM perikanan khususnya nelayan dilihat dari rendahnya tingkat pendidikannya menyebabkan proses alih teknologi dan ketrampilan tidak sesuai dengan harapan. (6) Masih rendahnya mutu hasil perikanan yang menyebabkan nilai jual produk perikanan menjadi rendah. | <p>ST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemanfaatan potensi SDI • Menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional. • Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional juga akan senantiasa memperoleh perhatian secara proporsional. Untuk meningkatkan investasi swasta diperlukan selain fasilitas yang memadai, juga iklim usaha yang kondusif. • Peningkatan kapasitas kelembagaan, hal ini bukan hanya berguna untuk meningkatkan kualitas lembaga perikanan yang ada namun guna menciptakan sinergisitas antar lembaga terkait. • Pengawasan dan penegakan hukum. Dengan strategi ini diharapkan rasionalisasi penangkapan guna peningkatan kualitas dan kuantitas hasil perikanan dapat dicapai. | <p>WT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menekan nilai kerugian akibat <i>IUU fishing</i>. • Pemberdayaan masyarakat, tujuan dalam strategi ini adalah guna meningkatkan SDM. • Peningkatan akses permodalan. Peningkatan ini dapat berupa peningkatan pengetahuan masyarakat perikanan terhadap cara mengakses permodalan bagi kegiatan usaha serta kerjasama dengan pihak perbankan yang khusus menangani hal tersebut. |
|---|---|---|

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rumusan strategi pengembangan PPN Brondong meliputi: 1) optimalisasi pemanfaatan potensi SDI; (2) menyediakan fasilitas yang memenuhi standar internasional; (3) pemeliharaan dan perbaikan fasilitas operasional PP; (4) peningkatan kapasitas kelembagaan; dan (5) pengawasan dan penegakan hukum

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pelabuhan dan staff PPN Brondong yang telah memfasilitasi penulis dalam prose pengumpulan data hingga penyusunan laporan penelitian. .

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, T. 2008. PPN Brondong Sudah Layakkah Menjadi PPS.....??. Makalah Ringkas. Lamongan. 4 hlm
- Bambang AN, Suherman A. 2006. Tingkat Pemanfaatan PPS Cilacap Ditinjau Dari Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Yang Tersedia. Buletin PSP 15:1-12.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1981. Pembinaan Pelabuhan Perikanan. Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1994. Petunjuk Teknis Pengolahan Pelabuhan Perikanan. Dirjen Perikanan Direktorat Bina Prasarana Perikanan, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1996. Pengembangan Prasarana Pelabuhan. Ditjenkan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Perikanan. 1997. Fungsi Peranan Pelabuhan Perikanan. Bina Sarana Perikanan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Prasarana Perikanan Tangkap. 2005. Peranan Pelabuhan Perikanan Dalam Penyediaan Data dan Informasi Perikanan. Direktorat Jenderal Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Directorate General of Capture Fisheries and Japan International Cooperation Agency (JICA). 2009. Indonesian Fishing Port 2009. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan Perikanan. Jakarta. 208 hlm.
- [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan-World Bank.2003. Pengembangan Kelembagaan Departemen Kelautan dan Perikanan (Studi Kasus Pengembangan Pelabuhan Perikanan). Jakarta. Departemen Kelautan dan Perikanan- World Bank .195 hlm.
- [DJPSDKP] Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 2005. Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tentang Perikanan. Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan. 56 hlm.
- [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2001. Pedoman Kerjasama Operasional Pelabuhan Perikanan. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 74 hlm.
- [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2002. Kebijakan, Strategi dan Program Kerja Pengembangan Sentra-Sentra Perikanan. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 70 hlm.
- [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2003. Profil Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 145 hlm.
- [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2004. Pencapaian Pembangunan Perikanan Tangkap Tahun 2001-2003. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 50 hlm.
- [DJPT] Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. 2007. Statistik Perikanan Tangkap Indonesia, 2005. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan. 134 hlm.
- [DKP] Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. Keputusan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:Per.16/MEN/2006. Tentang Pelabuhan Perikanan. 16 hlm.
- Eriyatno. 2003. *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*. Bogor: IPB Press. 147 hlm.
- Fauzi A. 2005. Kebijakan Perikanan dan Kelautan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 185 hlm.
- Guckian WJ. 1970. The Planning and Preparatory Work for A Fishery Harbour Development

- Project. London: Fishing News (Book) Ltd. 32-54 hlm.
- Kamaluddin LM. 2002. *Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 331 hlm.
- Kramadibrata S. 2002. *Perencanaan Pelabuhan*. Bandung: Penerbit ITB. 471 hlm.
- Murdiyanto B. 2004. *Pelabuhan Perikanan*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 2009. *Laporan Tahunan 2008*. Lamongan : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. 73 hlm.
- Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. 2009. *Statistik Perikanan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2008*. Lamongan : Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. 108 hlm.
- Rangkuti F. 2000. *Analisa SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia. 188 hlm.
- Suherman A, Murdiyanto B, Marimin, Sugeng SH. 2006. Analisis pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan samudera Cilacap. *Jurnal Penelitian Perikanan*. Volume 9 No. 1: 101–107.